

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan referensi penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dimiliki oleh penulis. Referensi penelitian terdahulu digunakan sebagai pelengkap dan pembandingan data yang dibutuhkan oleh penulis agar penelitian yang dilakukan layak untuk dijadikan karya ilmiah. Penulis memperoleh referensi penelitian dari banyak sumber yang relevan dengan judul dan topik penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Peneliti : Mohamad Taufik Universitas Dian Nuswantoro Semarang 2012	Judul : Infografis Sebagai Bahasa Visual Pada Surat Kabar Tempo Jurnal Techno.com, Vol.11, No.4, November 2012: 156- 163	Dengan menggunakan infografis, para infografer media dapat melakukan penyederhanaan atau menciptakan berita menjadi lebih “spektakuler” dari bentuk naskah panjang menjadi bentuk yang efektif, memiliki sistematika baca, runtut, dan menceritakan kronologi.
2.	Peneliti : Muthiah Nurul Miftah, Edwin Rizal, Rully	Judul : Pola Literasi Visual Infografer Dalam Pembuatan Informasi Grafis	Pola literasi visual para infografer dalam pembuatan infografis di <i>House</i>

	<p>Khairul Anwar Universitas Padjadjaran 2016</p>	<p>(Infografis) Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, Vol.4, No.1, Juni 2016, hlm.87-94</p>	<p><i>of Infographic</i> (HOI) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infografis yang dihasilkan oleh infografer dibuat dengan pemaknaan objek yang divisualisasikan dan diasah terus menerus. Sehingga kualitas infografis yang dihasilkan infografer HOI lebih berkualitas karena pengalaman indrawi infografer dalam membaca objek dan memvisualisasikannya yang sering dilakukan. 2. Infografer di HOI awalnya melakukan brainstorming dengan client, pengumpulan informasi dan data, lalu melakukan brainstorming lagi dengan tim
--	---	---	--

			HOI, menetapkan konten, menyusun narasi, perancangan visualisasi informasi, lalu publikasi.
3.	Peneliti : Septian Trirachmanto Institut Seni Indonesia Yogyakarta 2017	Judul : Kajian Infografis Humor Malesbanget.com (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough) Metode : Kualitatif Teori : Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Jurnal Penelitian	Teks : Pesan teks verbal yang ringan dan humor dalam infografis humor maslebanget.com diberikan sentuhan visual, maka visualisasi tersebut hanya menjadi pendukung interpretasi teks verbal. Sehingga visualisasi (desigm, layout, dll) tidak menjadi sesuatu yang ditonjolkan karena mengikuti tema teks verbal yang ringan dan humor. Penekanan pesan ada pada teks humor yang ringan. Discourse Practice : Yang diwacanakan dalam infografis humor maslebanget.com adalah perilaku

			<p>menyimpang masyarakat yang menggambarkan kehidupan yang bebas di era globalisasi budaya. Wacana terkait gaya hidup bebas merupakan realitas sosial yang dikonstruksikan dalam teks infografis humor maslebanget.com (MBDC). MBDC mencoba menjadi media yang mencerminkan realitas yang terjadi di lingkungan sosial.</p> <p>Sociocultural Practice : MBDC cenderung bersifat menghibur. Pendekatan MBDC pada khalayak menambah warna komunikasi di dunia <i>cyber</i> melalui basa-basi, pendistorsian informasi, stereotype dan humor. Penggunaan infografis sebagai alat komunikasi dengan khalayak</p>
--	--	--	--

			<p>membawa dampak gaya hidup bebas di dunia cyber.</p> <p>Khalayak di website MBDC dapat saling berkomunikasi, berkomentar, berdebat, atau membagikan informasi, dan lain-lain. Melalui strategi infografis sebagai pendekatan kepada khalayak melalui media, MBDC mencari keuntungan untuk popularitas website MBDC.</p>
--	--	--	---

Sumber : Penelitian terdahulu, dan diolah oleh penulis

2.1.1 Critical Review

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang dan hasil penelitian tersebut berupa skripsi dan jurnal. Persamaan pada umumnya adalah penelitian terdahulu yang diambil penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis tidak banyak menemukan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sehingga referensi yang digunakan oleh penulis tidak terlalu banyak. Penulis mengambil referensi yang memiliki relevansi atau berkaitan dengan representasi, dinamika politik, dan infografis.

Penelitian milik Mohamad Taufik dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang tahun 2012 berjudul Infografis Sebagai Bahasa Visual Pada Surat Kabar Tempo dalam Jurnal Techno.com, Vol.11,

No.4, November 2012: 156-163. Persamaan penelitian dari judul tersebut dengan penelitian milik penulis adalah adanya penelitian yang mengambil objek tentang infografis. Perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan sebelumnya merupakan infografis yang ada di surat kabar, sedangkan infografis yang penulis ambil sebagai objek penelitian dari media sosial instagram. Perbedaan lainnya adalah penelitian yang dilakukan sebelumnya menjelaskan tentang infografis sebagai bahasa visual pada surat kabar, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan menjelaskan tentang representasi dinamika politik golongan muda di media sosial instagram.

Penelitian milik Muthiah Nurul Miftah, Edwin Rizal, Rully Khairul Anwar dari Universitas Padjadjaran tahun 2016 dengan judul Pola Literasi Visual Infografer Dalam Pembuatan Informasi Grafis (Infografis) dalam Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, Vol.4, No.1, Juni 2016, hlm.87-94. Persamaan penelitian dari judul tersebut dengan penelitian milik penulis adalah adanya literasi visual yang terjadi melalui infografis. Perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan sebelumnya mengangkat penuh pola infografer mengolah data dan gambar hingga menjadi infografis dan tidak memuat pesan politis, sedangkan yang penulis angkat sebagai bahan penelitian adalah infografis yang memiliki unsur pesan politis pada infografis akun Instagram @pinterpolitik.

Penelitian milik Septian Trirachmanto dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 2017 dengan judul Kajian Infografis Humor Malesbanget.com dalam Jurnal Penelitian. Persamaan penelitian dari judul tersebut dengan penelitian milik penulis adalah adanya literasi visual pada realitas sosial yang digambarkan melalui infografis serta penggunaan metode dan pendekatan yang sama. Metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan sebelumnya berkonten humor, sedangkan yang penulis angkat sebagai bahan penelitian adalah infografis yang memuat pesan politis pada akun @pinterpolitik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Representasi

Dikutip dari artikelsiana.com, representasi adalah merupakan suatu kegunaan dari tanda. Representasi bekerja pada hubungan suatu tanda dan makna. Konsep representasi sendiri dapat berubah-ubah, selalu terdapat pemaknaan baru. Representasi berubah-ubah akibat adanya makna yang juga berubah-ubah setiap waktu terjadinya proses negosiasi dalam pemaknaan. Representasi bukanlah suatu kegiatan ataupun juga proses statis melainkan juga merupakan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan adanya kemampuan intelektual dan jugak ebutuhan para pengguna tanda yakni manusia sendiri yang terus mengalami aktivitas gerak dan juga dinamis atau berubah. Representasi merupakan suatu proses usaha konstruksi. Karena adanya suatu pandangan terbarukan yang mampu menghasilkan pemaknaan baru.

Dikutip dari pelajaran.id, bahwa pengertian representasi menurut para ahli diantaranya :

1. Pengertian Representasi Menurut Marcel Danesi

Menurut Marcel Danesi bahwa pengertian representasi bahwa definisi representasi adalah sebagai proses merekam ide, pengetahuan atau pesan dalam beberapa cara fisik yang disebut dengan representasi.

2. Pengetian Representasi Menurut Cris Barker

Menurut Cris Barker bahwa pengertian representasi adalah kajian utama cultural studies, cultural studies yang memusatkan pada diri kepada bagaimana suatu proses pemaknaan representasi itu sendiri. Maksud dari representasi adalah cultural studies, bahwa pengertian representasi tersebut adalah makna yang mempunyai sifat material yang mereka tertanam dalam bunyi-bunyi, tulisan, benda-benda, program-program televisi.

3. Pengertian Representasi Menurut Stuart Hall

Menurut Stuart Hall bahwa pengertian representasi berarti adalah salah satu praktek saling memproduksi kebudayaan. Menurut Stuart Hall tentang kebudayaan adalah representasi dikarekan, pengertian representasi adalah suatu konsep yang sangat luas. Bahasa medium yang menjadi suatu perantara dalam pemaknaan sesuatu lewat bahasa dalam hal ini simbol-simbol dan tanda tertulis, lisan atau gambar) yang

mengungkapkan suatu pikiran, konsep dan ide-ide tentang sesuatu. Makna sesuatu hal yang tidak lepas dari cara individu yang mempresentasikan.

4. Pengertian Representasi Menurut Eriyanto

Menurut Eriyanto bahwa pengertian representasi adalah merujuk pada seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu dalam pemberitaan.

5. Pengertian Representasi menurut David Croteau dan William Hoynes

Menurut David Croteau dan William Hoynes bahwa pengertian representasi adalah hasil dari suatu proses penyeleksian yang menggaris bawahi suatu hal-hal tertentu dan hal lain yang diabaikan. Dalam representasi media, tanda yang digunakan untuk melakukan representasi tentang suatu hal.

6. Pengertian Representasi Menurut Goldin

Menurut Goldin (2002) bahwa pengertian representasi adalah sebuah konfigurasi (bentuk atau susunan) yang mampu menggambarkan, mewakili, atau melambangkan sesuatu dalam suatu cara. Representasi merupakan yang mampu mewakili, menggambarkan atau menyimbolkan berupa obyek dan juga suatu proses.

7. Pengertian Representasi Menurut Jones & Knuth

Menurut Jones & Knuth (1991) bahwa pengertian representasi adalah model atau bentuk pengganti dari suatu situasi masalah atau aspek dari adanya situasi masalah yang digunakan yang bergungsi dalam menemukan solusi yang merupakan sebagai contoh, yang menjadi suatu masalah dapat direpresentasikan yang berupa obyek, gambar, simbol matematis, dan kata-kata.

8. Pengertian Representasi Parmentier

Menurut Parmentier (dalam Ludlow, 2001:39) bahwa pengertian representasi didefinisikan sebagai aktivitas atau hubungan dimana dalam satu hal mewakili hal lain yang sampai pada suatu level tertentu, untuk tujuan tertentu dan yang kedua oleh subjek atau interpretasi pikiran. Representasi menggantikan atau mengenai suatu penggantian suatu obyek, penginterpretasian pikiran tentang suatu pengetahuan yang didapatkan dari suatu obyek yang dapat diperoleh dari pengalaman tentang adanya representasi.

9. Pengertian Representasi Menurut Steffe

Menurut Steffe dkk (2002, 47) bahwa definisi representasi adalah proses pengembangan mental yang telah dimiliki oleh seseorang yang telah dibuktikan dan divisualisasikan dalam suatu model yang dimatematisasi contohnya berupa verbal, gambar, benda konkret, tabel, model-model manipulatif atau kombinasi dari keseluruhan.

Proses-Proses Terjadinya Representasi

Adapun proses dari terjadinya representasi adalah sebagai berikut :

Realitas. Pengertian realitas secara bahasa tulis dapat berarti dokumen wawancara transkrip dan sebagainya. Sedangkan dalam televisi misalnya perilaku, make up, gerak-gerik, pakaian dan juga ucapan.

Representasi. Representasi merupakan sebagai elemen tadi yang ditandakan secara teknis. Dalam hal ini secara bahasa tulisan contoh-contohnya adalah berupa kata, proposisi, grafik, kalimat, foto dan caption. Dalam TV misalnya kamera, musik, tata cahaya, dan lain-lainnya. Elemen tersebut berupa transmisi ke dalam kode representasional yang dimasukkan diantaranya bagaimana objek. Digambarkan berupa karakter, narasi, dialog dan setting serta lain-lainnya.

Ideologi. Semua elemen yang diorganisasikan dalam koherensi dan kode ideologi, misalnya individualisme, sosialisme, kelas, materialisme, liberalisme, patriarki, ras dan sebagainya.

2.2.2 Dinamika Politik

Politik memiliki sifat yang dinamis setiap tahunnya. Utamanya pada masa pergantian pimpinan negara atau Pilpres, akan semakin banyak isu dan peristiwa politik yang membentuk sebuah dinamika politik yang berbeda dari satu periode ke periode berikutnya. Setiap pergerakan politik elit (pemerintahan) dan politik arus bawah (lokal) akan menghasilkan perubahan-perubahan yang membentuk dinamika politik. Dinamika politik adalah suasana politik, keadaan percaturan politik seperti menjelang Pemilu atau Pilkada. Dinamika politik pada umumnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat (Badudu : 1994). Politik bersifat dinamis sehingga muncul istilah dinamika politik, yaitu perubahan atau pergerakan politik pada pemerintahan suatu negara

yang mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintahan. Kedinamisan ini menjadi nilai dari bagaimana kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Seringkali dinamika politik membuat masyarakat bingung terhadap langkah strategis demokrasi Indonesia. Terlepas dari kebingungan masyarakat terhadap kondisi politik Indonesia yang sangat dinamis, perlu diketahui bagaimana dinamika politik Indonesia bisa terjadi dari awal hingga hari ini.

2.2.2.1 Sejarah Dinamika Politik Lokal

Sifat politik yang dinamis membuat banyak kebijakan politik yang berubah ataupun bergeser. Tindakan pemerintah juga mengalami perubahan sehingga kondisi politik pemerintahan Indonesia sulit untuk diprediksi. Berdasarkan survey penduduk antar sensus (Supas) 2015 dalam datakata.co.id, jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) mencapai 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7% dari total jumlah penduduk secara keseluruhan. Sejumlah 17,37 juta jiwa berusia lebih dari 65 tahun atau sebesar 6,51% dari jumlah penduduk keseluruhan. Jumlah tersebut menunjukkan adanya masa bonus demografi yang memungkinkan terkena dampak dari dinamika politik. Banyaknya jumlah penduduk menjadi gambaran bahwa adanya kekuatan masa yang bisa diperoleh bagi orang-orang yang ingin berkuasa di negeri ini. Berbagai strategi politik dilakukan agar keinginannya mendominasi pemerintahan dapat terwujud. Dinamika politik lokal yang terjadi saat ini pasca Pilkada 2018 dan menjelang Pilpres 2019 bukanlah hal baru.

Dalam buku *Dinamika Politik Lokal* (Ratri, 2009 : 8-22), dinamika politik lokal memiliki sejarah yang panjang. Indonesia usia sejarah politik lokalnya sudah hampir sama dengan usia penjajahan kolonial, desentralisasi kekuasaan, dan administrasi pemerintahan itu sendiri. Sejarah politik lokal terbagi menjadi beberapa tahapan masa diantaranya : penjajahan kolonial Belanda; penjajahan kolonial Jepang; pasca kemerdekaan tahun 1945; Republik Indonesia Serikat 1948-1949; demokrasi parlementer; demokrasi terpimpin; orde baru; dan pasca orde baru.

Masa Penjajahan Kolonial Belanda

Di awal masa penjajahan sebelum tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda menerapkan aturan hukum berupa *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie* (Stb 1855/2) yang sangat konservatif. Aturan tersebut menjelaskan tentang sentralisasi kekuasaan di Hindia Belanda bukan sebaliknya. Di samping menjalankan sentralisasi, dekonsentrasi memberikan kekuasaan kepada wilayah-wilayah administratif secara hirarkhis, namun hanya terbatas di pulau Jawa saja. Lahirnya istilah seperti *Gewest* kemudian berubah menjadi *Residentie*, *Afdeeling*, *District*, dan *Onder-district*, merupakan pertanda adanya bentuk perwakilan kewenangan pemerintah Belanda pada wilayah-wilayah di daerah jajahannya.

Sehingga, desentralisasi sesungguhnya bukanlah hal baru di bumi Indonesia, karena pada masa penjajahan kolonial Belanda di tahun 1903 para elit Eropa di Hindia Belanda diberikan wewenang mendirikan pemerintahan sendiri, namun secara terbatas. Kerajaan Belanda menerbitkan *Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch Indie* (Stb. 1903/329), lebih dikenal sebagai *Decentralisatiewet* 1903. Menurut Harry J. Benda (1966), undang-undang ciptaan bangsa penjajah tersebut tidak memberikan landasan apapun dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hanya daerah-daerah besar sajalah mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Hindia Belanda. Selanjutnya, dapat ditebak bahwa titik berat penyelenggaraan otonomi daerah hanya fokus pada provinsi dan kabupaten besar saja.

Pada tahun 1922, terbit Undang-undang tentang desentralisasi, menjadi dasar lahirnya provinsi-provinsi baru dengan otonomi administratif cukup besar. Namun demikian Sutherland (1979) mengatakan bahwa pemberian otonomi tersebut bukanlah ditujukan memberikan jalan bagi pertumbuhan demokratisasi lokal, namun sebagai benteng penangkal nasionalisme saja. Pemberian kewenangan otonomi administratif hanya menimbulkan kekacauan belaka akibat semakin tajam perbedaan antara kaum aristokrat kolonial dengan pribumi dalam mengatur pemerintahan. Pada tahun 1931, pemberontakan kekuatan komunis di Jawa Barat dan Sumatera Barat

memaksa penjajah kolonial menarik kembali kewenangan otonomi lokal ke sentral (sentralisasi).

Ciri dari sistem pemerintah kolonial sebelum kemerdekaan adalah sebagai berikut : Pemerintahan tidak langsung; Pemberlakuan aturan double standart, hukum eropa konservatif bagi elit Eropa dan hukum adat bagi pribumi; Berkembangnya elit pribumi berdasarkan garis keturunan kerajaan sebagai wakil pemerintah kolonial di luar pulau Jawa; Isolasi gerakan nasionalis; Pengendalian ketat daerah-daerah pedesaan dan daerah luar Jawa oleh elit pribumi tradisional patuh pada kekuasaan kolonial.

Masa Penjajahan Kolonial Jepang

Pada masa pendudukan kolonial Jepang, daerah bekas jajahan Belanda terbagi menjadi tiga komando, yaitu: 1) Sumatera di bawah Komando Panglima Angkatan Darat XXV di Bukittinggi; 2) Jawa dan Madura di bawah Komando Panglima Angkatan Darat XVI di Jakarta; 3) Daerah lain di bawah Komando Panglima Angkatan Laut di Makassar.

Selanjutnya, pola pemerintahan pada masa setelah tahun 1943, kekuasaan menjadi sentralistis dipulihkan kembali, dengan kekuasaan berada pada Gubernur Jenderal atau disebut dengan Saikosikikan. Aturan-aturan selanjutnya tentang pemerintahan daerahpun bikinan kolonial Belanda, dibuat sedemikian rupa sehingga daerah provinsi dan kabupaten hanyalah sebagai boneka-boneka yang taat pada keinginan pemerintahan kolonial Jepang atau Pemerintah Bala Tentara Jepang. Seperti diungkapkan oleh Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah (Alumni: Bandung, 1978), hal. 36-37. Pemerintahan kolonial Jepang sepertinya tidak ingin mengambil resiko lebih besar dengan memberikan kekuasaan dan kewenangan pada kaum pribumi mengatur urusan di daerah masing-masing. Artinya pola pemerintahan lokal Indonesia di masa penjajahan kolonial Jepangpun tidak jauh dari nuansa sentralistis.

Masa Kemerdekaan 1945

Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda yang terusir dari bumi Hindia Belanda karena kekalahannya melawan Jepang berusaha merebut kembali kekuasaannya di Indonesia. Segala dalih politikpun direncanakan demi merebut ambisi menduduki kembali bumi Indonesia, karena kerajaan Belanda masih memandang bahwa Indonesia sebagai koloninya. Di bawah tekanan dunia internasional, Belanda dipaksa menunaikan tanggung jawab moralnya sebagai eks-penjajah dengan membantu merancang tata administrasi pemerintahan negara Indonesia yang masih sangat belia. Pada saat itu, di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa serangkaian misi perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah kerajaan Belanda dijalankan. Negara-negara kuat, seperti Inggris, memantau perkembangan perundingan dengan seksama.

Di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, negosiasi diplomatik terjadi antara pemerintah Indonesia dan pemerintahan kerajaan Belanda. Di bulan September 1946 perwakilan Indonesia memulai pertemuan dengan perwakilan pemerintah kerajaan Belanda di Linggarjati dengan difasilitasi oleh pemerintah Inggris. Pemerintah Belanda memaksa berlakunya sistem negara federal di Indonesia. Pada bulan Desember 1946 negara Indonesia Timur dibangun atas dasar hasil Konferensi di Bali sebagai bagian dari cikal bakal negara federasi. Pada bulan Maret 1947, perundingan Linggarjati ditandatangani, dengan isi bahwa pemerintah Belanda dan Indonesia harus bekerja sama mendirikan negara demokrasi yang berdaulat disebut dengan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara RIS termasuk Republik Indonesia (Sumatera dan Jawa), Kalimantan, dan Negara Indonesia Timur. Ide tentang sistem negara federal tersebut dengan cepat diasosiasikan sebagai upaya pemerintah Belanda untuk mendestabilisasi Indonesia. Itikad buruk pemerintah Belanda untuk menjajah kembali Indonesia dilakukan dengan cara membagi-bagi Indonesia ke dalam unit-unit pemerintahan kecil sehingga lebih mudah dikontrol dan menghindari munculnya gerakan-gerakan nasionalis pro-kemerdekaan. Akan tetapi ada saja segelintir elit Indonesia yang masih menginginkan kekuasaan, membuka dirinya untuk membantu mensukseskan rencana Belanda tersebut.

Ketika itu, banyak masyarakat Indonesia tidak puas dengan perundingan Linggarjati dan bergabung dalam perjuangan gerilya

melawan tentara Belanda. Pada bulan Juli 1947 Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dengan menyerang gerilyawan. Pada bulan Januari 1948, perjanjian Renville ditandatangani mengakhiri perang. Pada bulan Desember 1949 kembali lagi Belanda melancarkan serangan pada kota Yogyakarta, saat itu sebagai ibukota Republik Indonesia. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap dan dipenjarakan di pulau Bangka. Di tahun berikutnya, di bawah tekanan Perserikatan Bangsa-bangsa, pemerintah Belanda dipaksa membebaskan Soekarno, Hatta, dan lainnya. Setelah Konferensi Meja Bundar disponsori Perserikatan Bangsa-bangsa, maka Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tanggal 27 Desember 1949.

Politik Belanda saat itu adalah merumuskan Indonesia ke dalam negara-negara bagian sehingga terciptalah bentuk negara Federasi yang bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Batas negara-negara bagian tersebut adalah mengikuti batas-batas garis provinsi sehingga terciptalah pemerintahan-pemerintahan regional bercirikan watak primordial dikuasai oleh elit penguasa daerah berdasarkan garis keturunan raja ataupun bangsawan.

Menurut hasil penelitian Adnan Buyung Nasution (2000), konsep federalisme pertama kalinya diperkenalkan oleh Ritsema van Eck, Kepala Kehutanan di Jawa pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Saat itu konsep Ritsema yang juga mengikutsertakan nasib kelompok etnis luar Indonesia di bawah kekuasaan kerajaan Belanda, Curacao dan Suriname, dipertanyakan oleh Prof. Van Vollenhoven, Prof. Snouck Hurgronje, dan Prof. Colenbrader, yang intinya mengatakan bahwa ide Ritsema hanyalah untuk memenuhi maksud Belanda untuk meningkatkan kekuatannya dengan membagi Indonesia ke dalam kelompok-kelompok etnis.

Perdebatan muncul pada saat negosiasi antara pemerintah Belanda dan Indonesia dalam memperjuangkan nasib kedaulatan Indonesia selanjutnya. Para pengusung ide negara federal berargumen bahwa sistem federal memungkinkan setiap wilayah untuk mendapatkan kesempatan untuk membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan keunikan budaya dan latar belakang etnis mereka. Pada akhirnya, perdebatan mencapai puncak ketika Indonesia menjadi

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang hanya bertahan 3 ½ tahun lamanya (1946-1949).

Menurut Nasution, ada 2 alasan kegagalan RIS yang memiliki 17 negara bagian yaitu: 1) Indonesia merasa dikhianati oleh Gubernur Jenderal Belanda Van Mook, karena pendirian negara miniatur di luar federasi: Pasundan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bangka, Belitung, di luar kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Belanda; dan 2) Tulisan Dr. Anak Agung Gde Agung, tokoh pemimpin dari wilayah Timur Indonesia, berisikan mengenai tiga setengah tahun pelaksanaan federalisme di wilayah Timur Indonesia ternyata gagal memberikan hasil memuaskan.

Konsep politik lokal ciptaan Belanda tersebut menemui jalan buntu ketika penguasa lokal harus berhadapan dengan elit nasionalis revolusioner yang berjuang dalam kombinasi diplomasi dan gerilya sekaligus. Para elit nasionalis revolusioner tersebut sangat mencurigai itikad buruk pemerintah kerajaan Belanda untuk mengambil alih kembali kekuasaannya di Indonesia dengan politik memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Maka di tahun 1950, negara federasi dinyatakan bubar dan kembali menjadi negara kesatuan.

Masa Demokrasi Parlementer

Pada masa demokrasi parlementer (1950-1959), lahir Undang-undang Nomor 1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956, dengan alasan: 1) bahwa berhubungan dengan perkembangan ketatanegaraan maka undang-undang pokok Pemerintahan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, perlu diperbaharui sesuai dengan bentuk Negara Kesatuan; 2) bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu Undang-undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Daerah otonom pun terbagi menjadi dua jenis: daerah swatantra dan daerah istimewa dengan konsep otonomi riil yang memandang bahwa "kenyataan kehidupan masyarakat itu penuh dinamika dan pertumbuhan.". Namun perkembangan situasi politik Indonesia masa itu kurang menguntungkan, perdebatan muncul di Dewan Konstituante antara tahun 1956 sampai tahun 1959 hampir membuat negara kesatuan kembali pecah. Perdebatan sangat tajam

muncul di tahun 1957 ketika semua kekuatan politik dan dari berbagai ideologi politik menyatakan pendapatnya mengenai sistem negara. Sentimen tentang ide negara federasi Indonesia rancangan Van Mook masih hangat diperdebatkan, walaupun juga ada beberapa bagian dari sistem federal yang diterima oleh pendukung negara kesatuan. Akan tetapi, Dewan Konstituante kembali gagal mencapai kesepakatan, dengan partai besar seperti PNI, PKI, dan lainnya seperti Murba, IPKI, GPPS terlibat perdebatan sengit mematahkan argumen teoritis akan keberadaan negara federal. Partaipendukung ide negara federal seperti, Masyumi, PSII, Partai Buruh, dan Parkindo ternyata harus mengalah. Pada akhirnya negara kesatuan disepakati sebagai pilihan dengan beberapa persyaratan, seperti : 1) penegakan demokrasi lebih berguna untuk meredakan ketidakpuasan di berbagai daerah, melawan ketidakadilan, dan menghindari sentralisasi yang tidak seimbang; dan 2) wilayah-wilayah sedapatnya akan diberikan otonomi seluas-luasnya.

Masa Demokrasi Terpimpin

Selepas Dekrit Presiden di tahun 1959 diberlakukan, pemerintahanpun semakin mengarah pada demokrasi terpimpin. Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 6/1959 (disempurnakan) dan Penetapan Presiden Nomor 6/1959 (disempurnakan) mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Dasar pemikiran undang-undang pemerintahan daerah adalah : 1) Tetap mempertahankan politik dekonsentrasi dan desentralisasi, dengan menjunjung paham desentralisasi teritorial; 2.) Dihapuskan dualisme pimpinan daerah.

Artinya, pemerintah Indonesia saat itu tetap berkomitmen menjalankan kebijakan pelimpahan kewenangan tata pemerintahan ke daerah-daerah. Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan daerah adalah terbitnya Undang-undang Nomor 18/1965 yang membagi habis daerah-daerah otonom di Indonesia ke dalam tiga tingkatan : 1) Provinsi dan/atau Kotaraya sebagai Daerah Tingkat I; 2) Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II; 3) Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat III.

Namun demikian, The Liang Gie mengungkapkan beberapa kelemahan Undang-undang No. 18/1965 tersebut, antara lain: 1) Politik desentralisasi masih mengandung apa yang disebut oleh Prof. John D. Legee sebagai colonial flavor (berbau kolonial), karena pemerintah pusat masih keras menunjukkan keinginan dan berusaha menancapkan serta memelihara kekuasaannya di lingkungan segenap wilayah bawahannya; 2) Undang-undang No. 18/1965 masih meneruskan memakai istilah "rumah tangga" daerah dari masa lampau yang sangat kabur pemakaiannya; 3) Masih menggunakan istilah "pemerintahan sehari-hari" yang tidak tegas pemaknaannya; 4) Menganut citra ketunggalan dan keseragaman, artinya penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia hanya diatur dengan satu peraturan saja dan isinya tidak memiliki pemahaman akan arti keberagaman tiap daerah; dan lainnya.

Sebagai penutup, The Liang Gie mengemukakan bahwa "...tampaknya tiada harapan besar bahwa di bawah UU desentralisasi yang baru itu di Indonesia dapat terselenggara pemerintahan Daerah yang jauh lebih maju daripada yang sudah-sudah."

Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan Orde Baru, lahirilah Undang-undang Nomor 5/1974 dimana semangat sentralisasi pemerintahan justru semakin menjadi-jadi. Undang-undang tersebut memainkan peranan penting dalam memperluas kekuasaan pemerintah pusat ke daerah. Penunjukan para gubernur dengan latar belakang militer oleh Presiden Soeharto sangatlah menguntungkan kejayaan bisnis militer mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di daerah. Para kepala daerah tersebut berlindung di balik doktrin dwifungsi ABRI yang ketika itu membenarkan peran militer aktif untuk terjun dalam pemerintahan sipil. Disamping para perwira militer menikmati jabatan puncak di daerah-daerah, para anggota militer pangkat lebih rendah memainkan peran mereka sebagai pelindung (backing) pengusaha-pengusaha pusat maupun lokal, menjual jasa pengamanan yang seringkali menimbulkan bentrokan dengan masyarakat sipil. Di dalam masa kekuasaan Order Baru, etnis cina Indonesia memperoleh perlakuan khusus, sehingga jurang ekonomi antara masyarakat keturunan etnis Cina dengan kaum pribumi menjadi sangat tajam. Lebih jauh lagi, masa pemerintahan

Soeharto memunculkan model pembangunan daerah yang timpang antara masyarakat di belahan Indonesia bagian Barat (Jawa dan Sumatra) yang kaya dengan masyarakat di Indonesia bagian Timur yang melarat dan kelaparan (Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur sebelum menjadi negara Timor Lester, dan Papua). Ketimpangan tersebut menjadikan pembangunan tidak merata di daerah pedesaan dan kemiskinan di daerah perkotaan, meningkatkan jumlah penduduk perkotaan sangat pesat. Sehingga peningkatan gejala penyakit sosial seperti tindak kriminal, kemiskinan, dan masalah gizi dan nutrisi semakin menyeruak. Soeharto tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga muncul peristiwa berdarah Mei 1998 yang menurunkannya dari tampuk kepemimpinan puncak Indonesia.

Masa Pasca Orde Baru

Terhitung sejak itu, pada tahun 1999, Indonesia mencatatkan sejarah dalam memasuki era desentralisasi sesungguhnya. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi membuka peluang politik lokal mencari jalan keluar menuju kemandirian daerah. Dapat dibayangkan semangat euphoria putra-putra daerah memindahkan kekuasaan dari pusat ke daerah berarti juga memberikan kesempatan mereka untuk menjadi “raja-raja” baru daerah. Tidak sedikit daerah-daerah dengan sumber daya alam kuat berencana memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Langkah-langkah strategis Presiden Habibie saat itu selain memberikan kebebasan pers, kebebasan mendirikan partai-partai politik, pemilu bebas, dan pemberian referendum bagi masyarakat Timor Timur yang berujung lepasnya provinsi termuda Indonesia tersebut menjadi merdeka sepenuhnya. Dengan demikian UU Nomor 22/1999 telah memberikan dasar-dasar pemerintahan desentralisasi administratif yang sangat banyak kelemahannya. Menurut Michael Malley (2004) dan Turner et al (2003), aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah tersebut mengadung kelemahan karena tidak mengikutsertakan masukan dari daerah-daerah. Sekelompok elit bekerja secara tergesa-gesa melahirkan model desentralisasi ala Barat. Desentralisasi tersebut memang sengaja dirancang atas dasar titipan

dari pemikiran-pemikiran Barat yang sangat itu sangat ingin memberlakukan model desentralisasi mereka ke negara-negara berkembang. Institusi-institusi internasional yang didanai oleh negara-negara maju berlomba-lomba menggelontorkan bantuannya bagi keniscayaan proses desentralisasi di Indonesia tanpa memperhatikan sendi-sendi kelembagaan di Indonesia yang sama sekali lemah dan tidak demokratis.

Pemaksanaan model desentralisasi Barat tersebut sangat didukung oleh institusi semacam IMF dan World Bank yang memang memiliki kepentingan menggolkan skema bantuan keuangan untuk menolong ekonomi negara berkembang yang mengalami krisis pasca gonjang ganjing moneter 1997. Akibatnya, desentralisasi mengobarkan konflik lokal karena terjadi banyak kesalahpahaman interpretasi di kalangan pejabat daerah yang menginginkan perluasan kekuasaan dibandingkan sebaliknya.

Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (2007) mengatakan bahwa dari sudut pandang tertentu undang-undang tahun 1999 itu menghidupkan kembali proses desentralisasi yang sempat terhenti di akhir 1950-an. Akan tetapi bila kita memandang dari sudut pandang lainnya, justru desentralisasi seperti memindahkan pola politik lama *divide et impera* di masa lalu ke dalam pemerintahan pusat yang bertindak seolah-olah sebagai pemecah belah kesatuan daerah-daerah. Pada prinsipnya, Undang-undang Nomor 22/1999 berusaha mendekatkan pemerintahan daerah agar lebih responsif kepada rakyatnya dan memberikan ruang transparansi lebih besar demi mencapai devolusi kekuasaan. Peran pemerintah pusat hanyalah terbatas sebagai penjaga malam saja karena sisa tanggung jawab setelah menjadi urusan daerah adalah meliputi: pertahanan keamanan nasional, kebijaksanaan luar negeri, masalah-masalah fiskal dan moneter, perencanaan ekonomi makro, sumber-sumber alam, kehakiman, dan agama. Daerah memiliki kewenangan mengurus pekerjaan umum, pendidikan dan kebudayaan, pemeliharaan kesehatan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, investasi, masalah-masalah lingkungan, koperasi, tenaga kerja, dan tanah (Ray dan Goodpaster, 2003).

Di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, masalah desentralisasi semakin mencuat ke permukaan dengan bantuan liputan berbagai media. Masalah-masalah seperti korupsi, kepala daerah yang memainkan politik uang ketimbang melaksanakan janji pada konstituennya, kemudian wakil rakyat yang hanya mementingkan 'perut' sendiri, memaksa pemerintahannya melahirkan undang-undang 'penangkal' baru, yaitu Undang-undang Nomor 32/2004 dan 33/2004, masing-masing tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Menurut Malley (2004), pemerintahan Megawati bukanlah mengamandemen undang-undang yang ada, tetapi malah menggantinya sama sekali. Sekalipun demikian, perubahan tidak banyak memunculkan gejolak berarti, bahkan terbilang tidak mengalami hambatan berarti karena pemilu Bupati pertama di bulan juni 2005 berlangsung lancar. Pilkada memilih pemimpin daerah secara langsung bukan simbol-simbol partai seperti masa lalu mendorong masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam kampanye dan datang berduyun-duyun mencoblos calon pilihannya di bilik-bilik pemilihan.

Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diwarnai dengan kebijakan-kebijakan desentralisasi bernama pemekaran. Pemekaran adalah nama yang dipergunakan dalam proses desentralisasi yang menciptakan unit-unit administratif baru di dalam provinsi-provinsi dan distrik-distrik yang telah ada sebelumnya. Istilah tersebut mungkin meniru sistem redistricting di Amerika Serikat yang berarti pembentukan kembali distrik-distrik. Proses redistricting di Amerika Serikat sama sekali bukan hal yang spesifik karena setiap tahun pemilihan hampir dapat dipastikan karena perubahan laju pertumbuhan penduduk, urbanisasi, imigrasi, dan emigrasi, sehingga peta wilayah pemilihan harus selalu disesuaikan. Lain halnya dengan proses serupa di negara-negara Afrika terutama Nigeria, pemekaran hampir selalu dikaitkan dengan maksud-maksud politis tertentu seperti penguasaan sumber-sumber daya alam, kekuasaan segelintir elit daerah, dan peluang mendapatkan alokasi bantuan dana dari pusat.

Ketika Mahkamah Konstitusi menyetujui tinjauan yuridis (judicial review) terhadap UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah di tahun 2008 yang memperbolehkan calon independen berkompetisi dalam ajang pemilihan kepala daerah dengan calon-calon kader partai politik, politik lokal seperti tidak terpisahkan dari proses politik dan demokrasi

di Indonesia. Selama ini, menurut ketentuan perundangan dalam UU tersebut, calon kepala daerah hanya boleh diajukan oleh partai politik sehingga calon-calon lain di luar partai politik tidak diberikan kesempatan sama sekali maju dalam pilkada. Momen bersejarah ini sangat penting bagi terbukanya ruang partisipasi masyarakat lokal dalam memilih pemimpin dambaannya. Figur-figur partai politik akan dipaksa lebih memperhatikan aspirasi masyarakat ketimbang ambisi pribadi dan partai pengusungnya. Walaupun demikian, jalan panjang masih harus dibenahi guna menggolkan calon-calon independen kepala daerah dalam pilkada masing-masing daerah. Aturan main dan batasan-batasan etika pengajuan calon masih terbentur dengan pola pemilihan lama yang mengandalkan kekuatan mesin-mesin politik partai dan uang sebagai jaminan kemenangan calon. Alhasil, calon independen sangatlah sulit memenangkan pilkada tanpa kehadiran partai politik pendukung.

Padahal, terbukanya ruang bagi calon independen merupakan ajang pembelajaran masyarakat lokal menjalankan demokrasi sesungguhnya. Sejalan dengan fitrahnya berdemokrasi akan kembali kepada rakyatnya juga. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses kehidupan sosial dan politik negaranya begitupun di tiap daerah tempat mereka tinggal. Keadaan seperti itu akan mendorong demokrasi ke level lokal. Tarik ulur antara proses demokratisasi pusat dan lokal serta interaksinya dengan sistem demokrasi di luar Indonesia, menghasilkan dinamika. Selain itu, desentralisasi terjadi di seluruh pelosok kabupaten dan kota di Indonesia turut menghasilkan dinamika politik lokal.

Menguatnya politik lokal dapat dilihat dari gegap gempita pelaksanaan pilkada yang di tahun 2008 ini serentak terjadi di hampir 300-an lebih Kabupaten Kota termasuk ke 33 Provinsi. Dapat dibayangkan berapa energi, waktu, dan uang bermain dalam kontes demokrasi lokal tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa jauh kemanfaatan proses demokratisasi lokal tersebut bagi pembelajaran politik bagi masyarakat lokal yang bukan hanya sebatas menyuarakan kepentingannya saja. Namun lebih jauh, terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang akan berdampak pada kehidupan mereka.

Untuk itu, pemahaman akan dinamika politik lokal sangatlah dibutuhkan bagi para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan di

daerah demi mewujudkan tata pemerintahan demokratis dan kesuksesan proses desentralisasi politik dan administrative di Indonesia. Sehingga kekuatan bangsa Indonesia bukan lagi harus didefinisikan secara terpusat seperti masa lalu, akan tetapi dari masyarakat lokal segala proses politik dimulai seperti ungkapan dari seorang juru bicara Kongres (Dewan Perwakilan Rakyat) Amerika Serikat periode (1977-1987), Thomas Phillip “Tip” O’Neill, Jr. , “*all politics is local*”.

2.2.2.2 Dinamika Politik Era Pemerintahan Jokowi-JK 2017-2018

Melihat dari sejarah dinamika politik lokal Indonesia, hari ini dinamika tersebut masih terus berjalan dengan beberapa kondisi yang berbeda. Berikut penulis merangkum isu dan peristiwa politik yang terjadi di masa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla periode 2017-2018 yang menjadi rangkaian peristiwa pada momentum menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang diantaranya : Isu 4 tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam perspektif ekonomi negara, Isu kinerja pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan janji-janji politiknya, Peristiwa perombakan menteri kabinet pemerintahan Jokowi-JK, Kasus Setyo Novanto korupsi E-KTP, Peristiwa menteri kabinet pemerintahan Jokowi-JK yang tersandung kasus korupsi, Isu politik keretakan hubungan politik kubu Jokowi dengan kubu Prabowo, Isu politik pemilu yang dilakukan dengan pendekatan agama islam, Kampanye tagar #2019GANTIPRESIDEN, Survey elektabilitas partai politik, Isu pencitraan yang dilakukan Jokowi pada ajang ASEAN Games, Peristiwa berita hoax Ratna Sarumpaet (tim sukses pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Sandiaga Uno), Peristiwa penembakan gedung DPR, Kisruh divestasi Freeport, dan masih banyak lainnya. Banyaknya peristiwa politik yang terjadi di Indonesia menggambarkan bagaimana kondisi kebijakan dan nilai demokrasi di Indonesia saat ini. Bidang ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan semua hal dikaitkan selalu dengan unsur politik. Begitu besar pengaruh isu dan peristiwa politik yang bergulir menjelang Pilpres 2019 sehingga membuat masyarakat dan tokoh politik terjebak dalam situasi yang kental akan nuansa politik baik praktis maupun pragmatis.

2.2.2.3 Dinamika Politik Menjelang Pilpres 2019

Berbagai dinamika dan peristiwa politik di Indonesia hari ini terjadi begitu intensif dan dinamis mulai dari pergerakan partai politik hingga banyaknya isu yang dikait-kaitkan dengan agenda politik. Hal ini membentuk perhatian yang begitu tinggi terhadap kontestasi Pilpres 2019. Faktor penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2018 kemarin disebut berpengaruh terhadap melonjaknya antusias *elite* politikus dan masyarakat dalam menyongsong agenda Pilpres 2019 mendatang. Selama ini tokoh nasional digandeng untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas calon Kepala Daerah. Tokoh politik nasional berperan sebagai *endorser* yang efektif bagi calon Kepala Daerah yang diusung oleh partainya. Adanya hubungan yang strategis antara tokoh nasional dengan tokoh daerah menjadi sinyal bahwa menakar kekuatan elektabilitas tokoh nasional adalah melalui kemenangan tokoh daerah yang resmi memenangkan kontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Hal pertama yang perlu diketahui sebagai gambaran dinamika kontestasi pada Pilpres 2019 mendatang adalah menurut Herzaky, dalam kompas.com 28 Maret 2018, perhelatan Pilkada 2018 bernilai strategis karena tiga faktor : Jumlah, Populasi, dan Waktu. Pertama, tercatat 17 provinsi dan 154 kota/kabupaten menggelar Pilkada serentak di 2018. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan Pilkada pada 2015 dan 2017. Kedua, populasi atau jumlah pemilih pada Pilkada 2018 merupakan yang terbanyak dibandingkan tahun 2015 dan 2017. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, pada Pemilu 2014 pemilih di 17 provinsi yang menggelar Pilkada di tahun 2018 mencapai angka 146,5 juta orang atau 77% dari 190,3 juta pemilih. Pada Pilkada 2018 KPU memprediksi terdapat 160 juta suara pada Pilkada yang diselenggarakan di 17 provinsi. Ketiga, waktu pelaksanaan Pilkada 2018 sangat dekat dengan masa pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden maupun calon Legislatif periode 2019-2024 atau kurang dari dua minggu setelah pemungutan suara Pilkada 2018. Dan masa pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan kurang dari dua bulan setelah masa Pilkada yakni awal Agustus 2018. Jumlah wilayah penyelenggara Pilkada serentak, jumlah pemilih, dan kedekatan periode waktu antara Pilkada 2018

dengan Pilpres 2019 berpengaruh terhadap ketegangan politik dan hal lainnya terkait kontestasi di Pilpres 2019.

Hal kedua yang menjadi gambaran dinamika politik Pilpres 2019 adalah isu dan peristiwa politik yang bergulir pada masa menjelang Pilpres 2019. Isu dan peristiwa politik merupakan salah satu strategi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu dengan tujuan dan kepentingan politik tertentu. Bisa juga isu dan peristiwa tersebut diramaikan sebagai senjata untuk memenangkan hati pemilih pada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tertentu.

Keramaian isu dan peristiwa politik menjadi sebuah dinamika yang membingungkan masyarakat perihal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden manakah yang layak didukung. Banyaknya dinamika yang dihadapi masyarakat membuat mereka semakin cerdas dan selektif dalam mengonsumsi isu dan peristiwa politik. Media tidak lepas dari perannya dalam mempublikasikan isu dan peristiwa politik yang berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2019. Seperti yang disampaikan Pengamat Sosial Politik dan Kemasyarakatan Kalbar, M. Sabran Achyar pada tribunpontianak.com 10 September 2018 lalu, Pilpres 2019 sedikit banyak seperti pengulangan dari Pilpres sebelumnya di tahun 2014 dan dinamikanya lebih menarik. Adanya pertarungan narasi gagasan kebangsaan dan politik identitas menjadi sorotan tersendiri yang menarik untuk diperbincangkan masyarakat menjelang Pilpres 2019.

2.2.2.4 Golongan Muda dan Dinamika Politik di Media Sosial

Media semakin berlomba menjadi wadah pemberitaan yang sangat dipercaya masyarakat. Konstruksi isu dan peristiwa pun dilakukan agar masyarakat tetap percaya terhadap media pemberitaan politik. Media seolah tidak pernah kehabisan bahan berita politik dan berlomba menjadi media yang mengabarkan paling terpercaya, cepat dan akurat. Para pengamat politik banyak diundang oleh media televisi untuk menyampaikan pendapatnya mengenai peristiwa politik yang terjadi berturut-turut menjelang Pilpres 2019. Media cetak berlomba mengangkat isu terhangat dan memperluas jangkauan pembaca hingga ke ranah *online*. Ada satu *platform* lagi yang kini media mulai menggunakannya untuk memperluas wilayah publikasinya dan

menggandeng generasi milenial atau golongan muda untuk bersama selangkah lebih maju perihal penelusuran informasi politik yang kekinian. Media sosial menjadi media yang paling mudah dan efektif digunakan untuk tempat singgah golongan muda dalam menikmati dinamika politik Indonesia saat ini. Melalui media sosial pula kampanye dapat dilakukan secara masif dan sebagai senjata lawan politik untuk saling hadang dengan peluru isu dan kasus politik yang menjeratnya. Berita media merupakan sumber utama yang membentuk alam pikir kita terhadap persoalan-persoalan publik yang lebih luas yang berada di luar jangkauan, pandangan dan pikiran kebanyakan warga negara bangsa (Walter Lippman 1992).

Dinamika politik menggambarkan proses interaksi politik antara supra struktur politik yakni para politisi dan penguasa. Sedangkan infrastruktur politik merupakan ruang politik warga negara untuk berinteraksi dengan penguasa yang mempunyai kekuasaan politik, dan warga negara memiliki kedaulatan politik disebut sebagai makhluk politik (Kausar, 2015). Plato telah memposisikan manusia sebagai makhluk politik (Republik, 2002). Masyarakat yang terlibat dalam interaksi politik di media secara tidak langsung telah menjadi bagian dari berlangsungnya dinamika politik lokal. Interaksi politik di media sosial juga memicu semakin kuatnya ketegangan yang terjadi menjelang Pilpres 2019 akibat dinamika politik lokal.

Menurut APJII pengguna internet terbanyak datang dari kelompok umur 25-29 tahun dan 35-39 tahun. Masing-masing berjumlah 24 juta pengguna atau 48 juta, bila digabung. Kelompok usia terbesar kedua adalah 30-34 tahun dengan 23,3 juta. Berikutnya, 20-24 tahun sebanyak 22,3 juta. Kelompok usia remaja 15-19 tahun mencapai 12,5 juta pengguna. Hal ini memungkinkan kaum muda untuk menggunakan media sosial sebagai alat pencarian informasi lebih jauh seorang tokoh politik. Adanya media sosial yang dimiliki oleh tokoh politik menciptakan ruang dialog antara politisi dengan publik serta menarik minat pemilih pemula/pemilih muda membuat media sosial semakin penting bagi politisi (Stieglitz & DangXuan, 2012). Menurut Ketua Forum Telematika KTI Hidayat Nahwi Rasul dalam diskusi bertajuk Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia, dengan jumlah yang masif, media sosial akan sangat efektif jika digunakan sebagai media baru untuk mengawal kualitas demokrasi

di Indonesia, apalagi media sosial juga menurutnya memiliki feedback yang cepat. Setiap individu bisa memproduksi dan bisa pula mengonsumsi informasi sehingga terjadi kecepatan pertukaran informasi. Hal ini termasuk informasi mengenai dunia politik.

Pihak yang berada dalam arena politik juga sudah mengerti pentingnya efek kampanye dalam media sosial dan komunikasi efektif yang dapat tercipta dari media sosial. Saat ini dapat dilihat bahwa berbagai partai politik memiliki akun sosial mediana tersendiri, baik melalui facebook, twitter, maupun instagram. Partai politik di Indonesia sudah banyak yang memiliki akun Facebook, Twitter, dan YouTube, di samping website resmi parpol (“Parpol Serius Garap Media Sosial”, Kompas.com, 29 Mei 2013). Hal ini mempermudah orang untuk mengetahui dengan leluasa dunia politik serta tokoh politik pilihan mereka, terlebih bagi pemuda dan pemilih pemula di Indonesia.

2.2.3 Media Sosial

Seiring berkembangnya teknologi media, saluran komunikasi politik mulai berkembang hingga ke media sosial. Kehadiran media sosial mempengaruhi sudut pandang pencarian informasi politik dan pemahaman informasi politik pada golongan muda. Kebebasan dan keterbukaan dalam mengakses informasi politik secara *online*, memudahkan mereka untuk memberikan tanggapan kepada pemilik informasi yang telah dijelajahi secara langsung dan cepat. Jelajah informasi secara online lebih menguntungkan dalam aspek *feedback* atau umpan balik. Penggunaan media sosial memungkinkan *feedback* dalam waktu yang cepat dari pengguna media sosial. Contoh realitanya umpan balik via *instagram* atau kolom komentar lebih cepat daripada umpan balik atau tanggapan yang ada pada surat kabar. *Feedback* inilah yang menjadi tanda hidupnya dinamika politik Indonesia di media sosial.

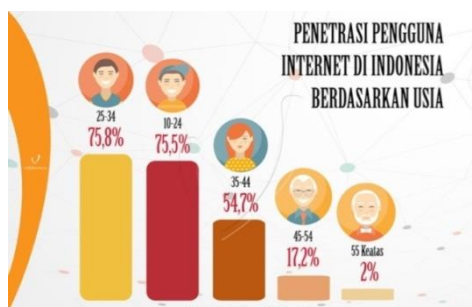
Sebagaimana dijelaskan oleh Kaplan dan Haenlein (2010) bahwa media sosial adalah *A group of internet-based application that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content*. Kaplan dan Haenlein memberikan tipologi media sosial yang mereka bagi dalam enam jenis yaitu : 1) *Collaborative project* : Wikipedia; 2) *Blog*;

3) *Content Communities* : Youtube; 4) *Social Networking Sites* :Twitter, Facebook, Instagram; 5) *Virtual Social Worlds* : Second Life; 6) *Virtual Game Worlds* : Warcraft. Pada tahun 2017, Tetra Pak Index menungkap bahwa tercatat ada lebih dari 106 juta orang Indonesia menggunakan media sosial tiap bulannya. Dimana 85% diantaranya mengakses sosial media melalui perangkat seluler. Dengan jumlah penggunaan media sosial yang tinggi di Indonesia, maka media sosial menjadi sebuah alat yang memengaruhi berbagai aspek komunikasi dalam kehidupan manusia. Bukan hanya komunikasi dengan orang dalam satu lingkup sosial yang sama, saat ini media sosial juga digunakan untuk menjalin komunikasi antar pihak yang berbeda lingkup sosial. Artinya kedua pihak yang berasal dari lingkup sosial berbeda dan belum pernah tercipta komunikasi di antara keduanya sekalipun, akan menjadi kan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Salah satunya ialah komunikasi yang tercipta antara orang awam dengan public figure lewat media sosial. Terdapat komunikasi antara orang awam dan politisi ini, tidak dapat dipungkiri akan menjadikan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan kampanye secara tidak langsung. Mengingat saat ini pengguna media sosial jumlahnya sangat banyak.

2.2.3.1 Instagram

Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan golongan usia muda 25-34 tahun memimpin sejumlah 132,7 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 (validnews.com). Menurut survey Jakpat 2015, hanya 37% partisipasi golongan muda Indonesia yang mengikuti isu politik atau perkembangan politik negaranya. Kesadaran partisipan golongan muda dimulai dari masa pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 yang dimenangkan Jokowi-Ahok. Tim sukses menyadari bahwa penggunaan media sosial berperan sangat luar biasa dalam meraih pasar golongan muda (validnews.com).

Gambar 2.1 Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Berdasarkan Usia



Sumber : validnews.com

Media sosial yang disukai golongan muda di Indonesia adalah media sosial Instagram. Popularitas instagram berada di peringkat kedua setelah facebook dengan 19,9 juta pengguna, menurut survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2016. Media sosial Instagram banyak disukai oleh golongan muda karena bentuk penyampaian informasi didominasi oleh foto, gambar, dan video durasi pendek, disertai kolom *caption* dan *hashtag* (#) guna mengelompokkan satu topik tertentu untuk mempermudah pencarian informasi. Selain foto, gambar, dan video, sajian postingan menarik yang dapat ditemukan di media sosial instagram adalah infografis.

Kemudahan dan kecanggihan fasilitas pencarian informasi di media sosial instagram menjadi daya tarik golongan muda menggunakan instagram sebagai saluran komunikasi yang efektif dan efisien. Sehingga pada momentum menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang, media sosial intagram dimanfaatkan menjadi saluran komunikasi politik dan sosialisasi politik oleh kelompok media tertentu untuk merangkul massa golongan muda agar memilih tokoh tertentu pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mendatang. Menurut Mc Quail, secara umum media massa memiliki berbagai fungsi bagi khalayaknya yaitu : pertama, sebagai pemberi informasi; kedua, pemberian komentar atau interpretasi yang membantu pemahaman makna informasi; ketiga, pembentukan kesepakatan; keempat, korelasi bagian-bagian masyarakat dalam pemberian respon terhadap lingkungan; kelima, transmisi warisan budaya; keenam, ekspresi nilai-nilai dan simbol budaya yang diperlukan untuk melestarikan identitas dan kesinambungan masyarakat (Yuniati:2002).

Keuntungan yang dapat dirasakan oleh pengguna instagram khususnya golongan muda dalam menggali informasi politik diantaranya : hanya dengan mengakses media sosial Instagram, mereka dapat mengetahui kasus korupsi Bupati Bekasi terhadap proyek Meikarta yang sedang ramai diperbincangkan di media massa; dari Instagram mereka dapat mengakses kasus Ahok menista agama beberapa tahun lalu; dari Instagram mereka dapat mengetahui apa saja yang sedang diperbincangkan masyarakat di dunia tentang politik internasional. Instagram begitu mempermudah kebutuhan golongan muda dalam mengakses informasi politik lintas waktu dan lintas wilayah negara khususnya di akun @pinterpolitik yang penuh dengan informasi beredukasi politik yang dapat diakses dengan mudah dan dapat membuka wawasan golongan muda tentang politik dan dinamikanya di Indonesia.

Dilihat dari kacamata pengguna media sosial Instagram, sebenarnya media sosial ini banyak menyajikan informasi yang belum tentu teruji kebenaran informasinya. Terlepas dari kebenaran informasi yang ada di instagram, golongan muda tetap responsif melalui fasilitas tombol *like*, *comment*, dan *share* yang ada dibawah kolom postingan intagram. Fungsi dan peran komunikasi massa itu sendiri adalah fungsi pengawasan atau kontrol sosial, fungsi *social learning*, fungsi penyampaian informasi, fungsi transformasi budaya, dan fungsi hiburan. (Bungin, 2009).

Pemahaman golongan muda terhadap dinamika politik Indonesia dapat digambarkan melalui aktivitasnya dalam menggali informasi politik di media sosial instagram. Mereka mencari kebenaran terhadap isu politik yang terjadi melalui informasi politik yang ada di media sosial instagram. Kemudian memberikan ulasan tentang informasi politik yang diperoleh dengan cara dipaparkan di forum, membuat karya tulisan, dan lain-lain. Dapat diketahui secara jelas bahwa media sosial instagram mengangkat banyak isu politik sehingga demokrasi Indonesia semakin berwarna dan menimbulkan banyak reaksi dari golongan muda yang merupakan bagian dari partisipasi politik. Bahkan banyak golongan muda yang masih belum mampu memahami pesan politik yang disampaikan oleh akun-akun tertentu karena sifatnya yang hanya sepeinggal informasi yang disampaikan. Sehingga pengguna instagram harus mencari banyak sumber lain agar dapat mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi.

2.2.3.2 Instagram Sebagai Saluran Komunikasi Politik

Melihat tingginya antusias masyarakat dalam mencari informasi politik, media memperluas jangkauan publikasi informasinya dengan memanfaatkan fungsi media sosial. Media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia hingga hari ini diantaranya Twitter, Facebook, dan Instagram. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi global, media sosial kini memiliki pengaruh yang besar sebagai saluran informasi. Media sosial menjadi pilihan golongan muda untuk mendapatkan informasi politik. Sosialisasi politik melalui media sosial ini mampu mendorong golongan muda terlibat dan berperan dalam kegiatan politik. Sosialisasi memiliki peranan penting dalam mendorong keterlibatan kaum muda dalam politik (Ahmeed, 2014; Sarwoprasodjo, 2009; Moeller, 2013; Floss, 2008).

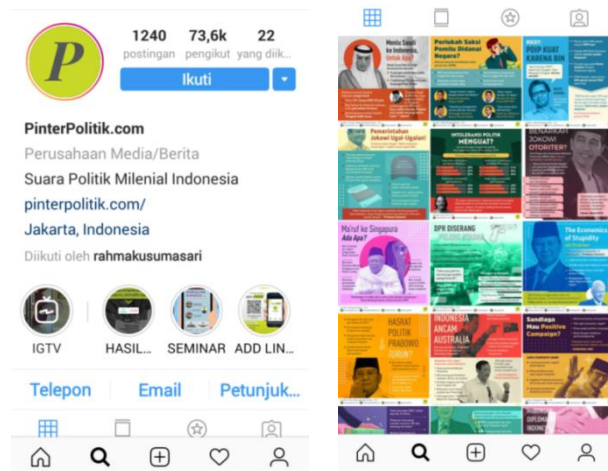
2.2.4 Infografis

Salah satu bentuk sajian informasi yang menarik dan efisien di media sosial instagram adalah infografis. Infografis sering disebut pula sebagai ilustrasi informasi (Glasglow, 1994). Infografis adalah teknik menyajikan informasi secara visual/grafis, sehingga mudah dipahami atau dibaca (Febrianto, 2014). Infografis juga disajikan di surat kabar serta televisi. Peneliti fokus mengambil infografis politik yang ada di media sosial Instagram. Dalam infografis dibutuhkan peran infografer yang memiliki kemampuan untuk mengubah pesan yang bersifat tekstual menjadi visualisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemampuan infografer dalam merubah konten tekstual menjadi visualisasi juga diupayakan memuat informasi yang bersifat edukatif, informatif, dan persuasif.

Infografis merupakan representasi visual yang grafis informasi, data yang atau pengetahuan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang kompleks dengan cepat dan jelas (Newsom and Haynes, 2004). Postingan infografis akun @pinterpolitik tampak didominasi informasi seputar isu atau peristiwa menjelang Pilpres 2019. Infografis berperan mempresentasikan data-data, angka, naskah, grafik, diagram, dan peta (Pahlevi : 2013).

2.2.4.1 Akun Instagram Pinter Politik

Salah satu akun instagram yang mendedikasikan kemampuan infografer dalam olah pesan politis yang diposting di media sosial instagram adalah akun Instagram @pinterpolitik. Representasi dinamika sosial oleh golongan muda di media sosial Instagram tergambar dalam komentar mengenai konten yang disajikan dalam bentuk infografis politik pada akun politik @pinterpolitik. Akun instagram @pinterpolitik menyajikan rangkuman peristiwa politik pemerintahan era Jokowi-Jusuf Kalla dari awal masa kerjanya hingga menjelang Pemilu 2019 dengan infografis. Konten infografis dikelompokkan berdasarkan tema peristiwa. Ada yang kontennya tentang kinerja pemerintahan Jokowi sebagai Presiden RI, ada yang tema nya tentang tokoh politik dan kaitannya dengan kinerja pemerintah, dan ada pula yang kontennya menyinggung tentang elektabilitas calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang maju dalam panggung Pilpres 2019. Infografis yang diposting oleh akun tersebut secara tidak langsung mengajak para pemuda untuk melakukan literasi visual. Kegiatan literasi visual yang diusung akun @pinterpolitik menjadi salah satu gerakan literasi yang mempermudah golongan muda dalam mendalami wawasan seputar politik dan memahami dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Sehingga diharapkan partisipasi politik pada Pilpres 2019 mendatang dapat didominasi oleh golongan muda.



Gambar 2.2 Tampilan Akun Instagram @pinterpolitik

Sumber : Instagram Pinter politik

Penulis menemukan satu akun politik di media sosial Instagram dengan nama akun @pinterpolitik. Pinter Politik memiliki *tagline* Suara Politik Milenial Indonesia. Dikutip dari pinterpolitik.com, sesuai dengan motonya, PinterPolitik hadir untuk memperjelas berita politik yang terjadi di negara ini. Konten-kontennya bertujuan untuk menggebrak berita di balik berita, membongkar politik dibalik politik dengan ulasan yang tajam, berani memihak atau berposisi, dengan penyuguhan yang lengkap dan terpercaya. PinterPolitik hadir bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami apa yang tersembunyi di setiap peristiwa politik di Indonesia. Berani menerima informasi yang dibentuk dengan sudut pandang kritis dan tidak *mainstream*, sehingga pembaca mendapatkan wawasan politik yang berbeda dari yang ada. Hal inilah yang mendasari penulis memilih konten infografis dari akun tersebut sebagai objek penelitian. Infografis yang dibuat oleh akun tersebut menjadi pembeda akun @pinterpolitik dengan media informasi politik lainnya di Instagram. Konten lebih bertema dan fokus menyoroti kinerja pemerintahan Jokowi-JK menjelang Pilpres 2019.

Akun @pinterpolitik per 31 Desember 2018 memiliki 1.240 postingan infografis dan 73.600 jumlah followers, serta mengikuti 22 akun lainnya termasuk akun resmi Jokowi dan Prabowo Subianto.

Pemilihan akun ini juga dilandasi oleh pertimbangan yang mendasar yaitu konten yang disajikan *up to date*, data yang disajikan dalam infografis menarik, penggunaan desain grafis yang menarik, terdapat ulasan mengenai infografis yang lebih lengkap dan detail di website pinterpolitik.com, mampu menjangkau golongan muda (kaum milenial) untuk berkomentar terhadap peristiwa yang digambarkan oleh akun tersebut melalui postingan infografis.

Infografis adalah seni dalam menyajikan informasi atau seni merangkum informasi melalui penambahan elemen desain grafis dan layout. Visualisasi pesan menjadi unsur terpenting dalam merubah informasi pesan berbentuk teks menjadi sebuah visualisasi pesan yang menarik. Literasi visual menjadi proses golongan muda dalam merepresentasikan dinamika politik Indonesia pada postingan infografis politik akun @pinterpolitik. Dalam proses literasi visual terdapat dua pokok utama yang mendasari rangkaian aktivitas literasi, yaitu proses input dan output. Langkah pertama yang dilakukan golongan muda dalam literasi visual adalah mencari informasi, mempelajari, dan memahami. Bagian ini merupakan proses input dari golongan muda dalam menginterpretasikan pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan output yang terjadi merupakan hasil dari interpretasi golongan muda setelah melewati proses pembelajaran/input. Dalam aktivitas literasi visual, masing-masing individu memiliki representasi yang berbeda-beda tergantung dari bagaimana pengalaman seseorang dalam memaknai objek yang telah dilihatnya pada masa lalu. Literasi visual merupakan kemampuan yang dapat dipelajari untuk menafsirkan objek visual secara tepat serta menciptakan objek visual (Glasglow, 1994). Lidman dan Lund berpendapat bahwa keuntungan dari sajian informasi yang ditampilkan dalam hasil dari proses desain informasi merupakan kesatuan dari kata, gambar dan grafis yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan satu sama lain, dalam memberitahukan sebuah pesan agar dapat dengan mudah tersampaikan dan dimengerti oleh para pembaca (Pettersson, 2012).

2.2.5 Komunikasi Politik dan Pesan Politik

Komunikasi politik merupakan dua disiplin ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi dan ilmu politik. Komunikasi politik dapat

diartikan kegiatan menstimulus atau mempengaruhi orang lain untuk tujuan politik baik pada hubungan suprastruktur maupun infrastruktur politik. Komunikasi politik merupakan suatu aktivitas pertukaran pesan yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau suatu lembaga dalam upaya memperoleh kewenangan untuk membela rakyat, baik dalam fungsi sebagai pelaksana pemerintahan maupun sebagai anggota sebuah struktur sosial masyarakat, dan dapat mempengaruhi suatu kebijakan sistem kekuasaan atau pemerintah dalam berbagai komponen (Effendy, 1989:277).

Namun apabila dimaknai komunikasi tersebut dalam proses pesan dapat dimengerti merupakan kajian komunikasi politik dalam pengembangan komunikasi terhadap berbagai aksioma yang berkembang. Ada lima aksioma komunikasi politik, Littlejohn (1983:75) menyebutkan bahwa: “Pertama, orang tidak bisa tidak berkomunikasi. Aksioma ini menekankan bahwa kita senantiasa mempengaruhi persepsi orang lain, apakah kita menginginkan atau tidak. Aksioma ini juga menekankan bahwa setiap perilaku yang terlihat secara potensial bersifat komunikatif. Kedua, setiap percakapan, betapapun singkatnya, meliputi dua pesan, sebuah pesan berhubungan bila dua orang sedang berinteraksi, masing-masing mengaitkan informasi pada yang lain, dan secara bersamaan, masing-masing juga mengomentari informasi tersebut pada tingkatan yang lebih tinggi. Hubungan pembicaraan yang simultan yang seringkali bersifat non-verbal, adalah meta komunikasi. Ketiga, interaksi selalu diorganisasikan ke dalam pola-pola yang mempunyai arti oleh komunikator. Ini disebut pengelompokan. Tahap-tahap interaksi, seperti kalimat tidak dapat dipahami sebagai rangkaian elemen yang terpisah-pisah supaya bisa diterima ia harus dikelompokkan. Keempat, orang menggunakan kode-kode digital dan juga analog. Hubungan antara tanda dan petunjuk betul-betul bersifat pilihan. Kelima, aksioma tentang komunikasi berhubungan dengan percocokan atau penggantian pesan-pesan di dalam interaksi. Aksioma ini melihat bahwa para komunikator mungkin merespon dengan cara yang sama atau berbeda satu sama lain. Bila dua komunikator dalam satu hubungan perilaku sama dan perbedaan-perbedaan diminimalkan, hubungan tersebut dikatakan sebagai sesuatu yang simetris. Tetapi perbedaan respon komunikator dimaksimalkan, maka dikatakan terjadi hubungan yang bersifat komplementer.”

Pada konteks politik dapat dimaksudkan bahwa komunikasi politik merupakan kegiatan bertukar pesan yang memiliki unsur pesan politik. Pesan politik sangat berkaitan dengan pembicaraan politik, David V.J Bell (dalam Nimmo, 1989). Meyakini terdapat tiga jenis pembicaraan yang mempunyai kepentingan politik, yaitu : Pembicaraan kekuasaan, atau pembicaraan yang mempengaruhi orang lain dengan ancaman dan janji; Pembicaraan pengaruh, adlah pembicaraan yang mempengaruhi orang lain dengan nasehat, dorongan, permintaan, dan peringatan; Pembicaraan otoritas, maksudnya adalah pemberian perintah. Untuk lebih memahami pesan politik penulis juga mempelajari mengenai sifat pembicaraan politik, diantaranya :

Kegiatan simbolik : kata-kata dalam pembicaraan politik.

Dalam hal ini kegiatan simbolik dilakukan oleh orang-orang yang menyusun makna dan tanggapan bersama terhadap perwujudan lambing-lambang referensial dan kondensasi dalam bentuk kata-kata, gambar, dan perilaku.

Bahasa : permainan kata dalam pembicaraan politik.

Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang tersusun dari kombinasi lambing-lambang signifikan (tanda dengan makna dan tanggapan bersama bagi orang-orang) di dalamnya, signifikansi lebih penting daripada situasi langsung tempat bahasa itu digunakan, dan lambing-lambang itu digabungkan menurut aturan-aturan tertentu. Bahasa disebut juga instrumen yang menunjukkan realitas. Berger, Peter, dan Thomas Luckman (dalam Ibnu Hamad, 2004) meyakini bahwa bahasa adalah alat konspetualisasi dan alat narasi. Oleh karena itu bahasa didayagunakan untuk pembicaraan politik. Penguasaan wacana politik yang baik oleh *elite* politik akan mempermudah mereka untuk meraih dukungan masa yang banyak.

Semiotika : makna dan aturan permainan kata politik.

Dalam hal ini pesan yang dihasilkan dari pengaruh peserta komunikasi memiliki beragam bentuk menghasilkan berbagai makna, struktur, dan akibat. Studi tentang keragaman tersebut merupakan satu segi dari ilmu semiotika, yakni teori umum tentang tanda dan bahasa.

Charles Morris (dalam Nimmo, 1989) menyatakan bahwa semiotika membahas keragaman bahasa dari tiga perspektif : semantika (studi tentang makna); sintaktika (berurusan dengan kaidah dan struktur yang menghubungkan tanda-tanda satu sama lain; dan pragmatika (analisis penggunaan dan akibat permainan kata).

Pragmatika : penggunaan pembicaraan politik.

Meyakinkan dan membangkitkan massa : pembicaraan politik untuk pencapaian material; Autoritas sosial : pembicaraan politik untuk peningkatan status; Ungkapan personal : pembicaraan politik untuk identitas; Diskusi publik : pembicaraan politik untuk pemberian informasi.

Lebih lanjut dikatakan Gazali bahwa komunikasi politik dalam pemilihan umum yaitu : (1) Komunikasi berisi informasi dan citra (kesan); (2) Informasi dalam Komunikasi Politik = Prospective Policy Choices (apa-apa saja kebijakan yang menguntungkan pemilih kalau memilih seorang kandidat), dan (3) Citra dalam Komunikasi Politik = Image Making (penguatan kesan atau memori bahwa seorang calon memang akan melaksanakan apa yang ia janjikan). Jadi Komunikasi Politik dalam Pemilu = Kompetisi memberikan informasi tentang kebijakan seorang kandidat yang menguntungkan pemilih + perlombaan membuat citra yang tertanam dimemori pemilih bahwa seorang kandidat akan lebih melaksanakan janjinya dibanding calon lain.

2.2.6 Konsep Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis mewakili beragam teori, metodologi, dan definisi yang mencakup konsep-konsep teori wacana dan teori kritis yang menyarankan suatu metode untuk mengungkap hubungan di antara berbagai perspektif. Dikutip dari laman pakarkomunikasi.com, yang menjadi landasan analisis wacana kritis adalah teori wacana yang digagas Michel Foucault dengan pernyataan sebagai berikut : “Analisis wacana kritis berbeda dengan analisis wacana dalam hal tujuan politis dan sosial. Akar analisis wacana kritis terletak pada retorika, teks linguistik, antropologi, filsafat, psikologi sosial, ilmu kognitif, studi literasi, dan sosiolinguistik serta linguistik terapan dan pragmatis”.

Konsep analisis wacana kritis terdiri dari empat konsep utama yaitu : wacana; kritis; ideologi; dan kekuasaan.

2.2.6.1 Wacana

Wacana dibedakan dari teks khususnya gambar, tulisan, dan utterances. Wacana merupakan bentuk keseluruhan dari pengetahuan dan arena yang tidak terbatas pada ekspresi yang pasti. Menurut Michel Foucault, penggunaan bahasa dan kata-kata ditentukan melalui discursive formations yaitu berbagai macam konvensi dan aturan yang bersifat memaksa pengetahuan dan makna kita terhadap berbagai macam hal. Wacana juga merupakan area hubungan sosial, praktek-praktek sosial dan perilaku sosial dibentuk serta dikelola.

2.2.6.2 Kritis

Kritis dapat dimaknai sebuah ciri adanya kekhawatiran perihal menifestasi kekuasaan dan praktek ideologi. Kekhawatiran tersebut dapat ditelusuri melalui hasil kerja kaum Marxis dan pengaruh dari peneliti aliran Frankfurt yang berpendapat ideologi-ideologi yang pasti dikirimkan melalui teks dan bentuk-bentuk budaya.

2.2.6.3 Ideologi Dan Kekuatan

Ideologi berperan menaturalisasi struktur dominan sehingga proses pembentukan makna dan pembentukan sosial menjadi kabur. Melalui ideologi, kekuatan dan ketidaksetaraan dikelola. Dalam hal ini ideologi menjadi unsur penting dalam analisis wacana kritis. Produksi tekstual dan penerimaan merupakan proses sosial.

2.2.6.4 Asumsi

Analisis wacana kritis tidak menyediakan satu macam atau teori khusus sebagai metode penelitian. Beberapa teori dan metode penelitian telah dipengaruhi oleh perkembangan analisis kritis. Beberapa teori tersebut dapat ditemukan dalam analisis wacana kritis, diantaranya :

teori epistemologis; teori sosial; teori psikologi sosial; teori wacana; dan teori linguistik.

Analisis wacana kritis membawa beragam teori untuk fokus pada aspek mikro dan makro struktur sosial. Pada aspek mikro wacana analisis wacana kritis mengasumsikan bahwa kekuatan manifestasi dalam penggunaan berbagai pola kata-kata dan gambar-gambar. Aspek mikro wacana meliputi kata-kata, kalimat-kalimat, dan gambar-gambar. Sedangkan pada aspek makro struktur sosial, analisis wacana kritis mengasumsikan bahwa identitas dibentuk di dalam dan melalui cara-cara kita memproduksi dan mengonsumsi wacana-wacana. Bahasa membentuk dunia sosial dan budaya kita.

Menurut Janet M. Cramer (2009), dengan demikian melalui kedua konteks di atas analisis wacana kritis mengasumsikan bahwa berbagai struktur sosial, budaya, identitas, dan kekuasaan bersifat tidak tetap. Dalam arti penggunaan bahasa yang berbeda maka akan merubah apa yang telah menjadi tatanan. Hal inilah yang dititikberatkan oleh analisis wacana kritis, yakni pada studi dan analisis tentang bagaimana kekuatan hubungan, ketidaksetaraan, dan dominasi diciptakan serta diabadikan melalui wacana dalam berbagai konteks politis, sosial, historis.

2.2.7 Pendekatan Analisis Wacana Kritis

Dikutip dari pakarkomunikasi.com, berikut pendekatan dalam analisis wacana kritis oleh para ahli : 1) Pendekatan Norman Fairclough. Pendekatan ini memiliki 3 tingkatan analisis yaitu : teks; proses produksi dan menerima teks (membuat, menulis, berbicara dan membaca, mendengar, menafsirkan atau biasa disebut praktik diskursif); dan konteks sosial yang lebih besar dimana teks diciptakan dan dikonsumsi. 2) Pendekatan Ruth Wodak. Pendekatan ini disebut juga dengan wacana sosiolinguistik yang berdasarkan pada tradisi sosiolinguistik Bernsteinian, aliran Frakfrut khususnya Jurgen Habermas. Pendekatan ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan mekanisme-mekanisme yang berkontribusi pada wacana yang melekat pada konteks khusus seperti struktur dan fungsi media atau institusi seperti rumah sakit dan lain-lain yang tidak dapat menghindari dampak komunikasi. 3) Pendekatan Teun A. van Dijk.

Van Dijk memandang analisis wacana sebagai analisis ideologi. Pendekatannya dalam menganalisis ideologi terdapat tiga bagian yaitu analisis sosial (menyelidiki keseluruhan struktur-struktur sosial atau disebut konteks); analisis kognitif; dan analisis wacana utamanya berdasarkan teks (sintak, leksikon, semantik lokal, tema, struktur-struktur skematik).

2.2.7.1 Prinsip Analisis Wacana Kritis

Berikut beberapa prinsip dasar yang telah diidentifikasi oleh Ruth Wodak dan Norman Fairclough : 1) orientasi terhadap masalah sosial (rasisme, seksisme, dan perubahan sosial); 2) Ekletisisme dalam teori dan metode; 3) Investasi ‘dari dalam’ yang maksudnya analisis dimulai dengan artifak tekstualnya yang pertama daripada membuat data sesuai dengan teori; 4) Pertimbangan hubungan intertekstual dan interdisipatif; 5) Sebuah akuntansi konteks historis; 6) Spesifikasi metode analisis yang tepat dalam penelitian (karena pendekatan ekletik); 7) Penerapan hasil analisis-analisis sering bertujuan mengubah praktik diskursif dan sosial yang menindas.

2.2.7.2 Analisa Representasi Kasus Dengan Analisis Wacana Kritis

Dikutip dari Jurnal Nasional Komunika, Vol.8, No.1 Januari – Juni berjudul Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough (2014), Marianne Jorgensen dan Louise Phillips berpandangan tentang konstruktivisme sosial dibentuk karena 1) pendekatan kritis terhadap pengetahuan yang *taken-for-granted*; 2) spesifikasi kultural dan historis; 3) hubungan antara pengetahuan dan proses sosial; 4) hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial. Penjelasan mengenai keempat premis, premis pertama menjelaskan tentang pengetahuan kita terhadap sesuatu berasal dari lingkungan atau produk wacana. Sehingga pengetahuan yang kita miliki tidak bersifat absolut, yang kemudian pengetahuan yang kita miliki disebut bersifat relatif. Premis kedua menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman kita dapat berubah sesuai dengan kondisi kultural dan historis. Sehingga wacana dimaksudkan sebagai bentuk tindakan memproduksi dan mereproduksi dunia sosial (pengetahuan, identitas, dan relasi sosial) dan pada gilirannya menciptakan dan mempertahankan pola-pola tertentu. Premis

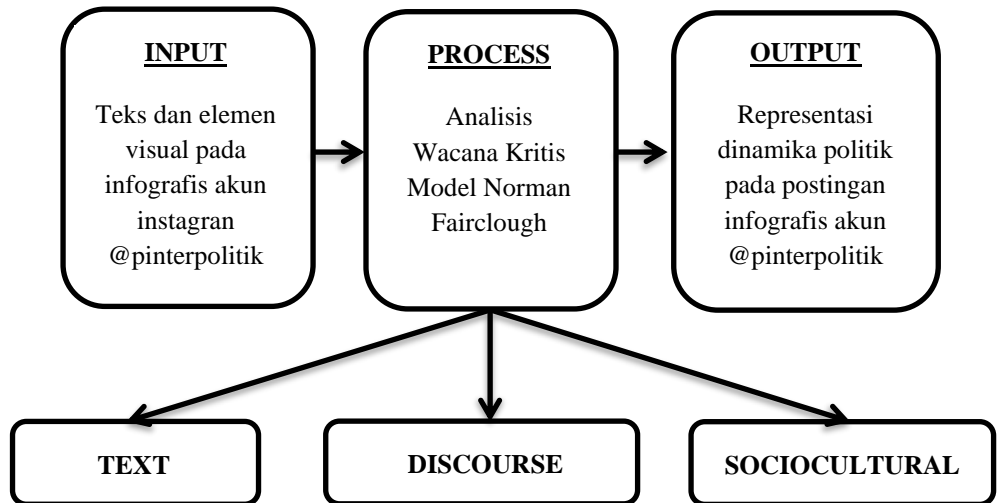
ketiga menjelaskan tentang proses sosial membentuk dan memelihara cara pandang kita terhadap realitas. Pengetahuan tentang benar dan salah diperoleh dari adanya interaksi sosial, bukan merupakan hasil pemikiran individual. Premis keempat menyatakan tentang adanya hubungan tentang pengetahuan sosial dan tindakan sosial. Sehingga konstruksi sosial yang berbeda akan menghasilkan pola tindakan yang berbeda pula. Teori konstruksionisme sosial di atas sangat berpengaruh pada teori analisis diskursus kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*). Menurut Fairclough, diskursus berperan dalam konstruksi identitas sosial, relasi sosial, dan sistem pengetahuan dan makna. Sehingga diskursus memiliki tiga fungsi yaitu fungsi identitas, fungsi relasional, dan fungsi ideasional. Fungsi identitas untuk menegaskan peran diskursus dalam mengkonstruksi identitas sosial pada anggota masyarakat. Fungsi relasional berkaitan dengan fungsi diskursus yang menciptakan relasi sosial masyarakat disesuaikan dengan identitas sosialnya. Dari pernyataannya, Fairclough menawarkan model tiga dimensi yang mewakili tiga domain yang harus dianalisis, yakni teks (ucapan, tulisan, image visual, atau atau kombinasi dari ketiganya), praktik diskursif yang melingkupi produksi dan konsumsi teks, dan praktik sosial. Dimensi pertama adalah teks yang merupakan hasil dari proses produksi. Dimensi yang kedua adalah praktik diskursif terkait interaksi teks dengan individu atau masyarakat dalam bentuk proses produksi dan interpretasi. Dimensi ketiga praktik sosial atau konteks mencakup praktik sosio-kultural dimana proses produksi dan interpretasi itu berlangsung. Ketiga dimensi ini dianalisis, deskripsi digunakan untuk menganalisis teks. Interpretasi digunakan untuk menganalisis proses produksi dan interpretasi teks. Eksplanasi digunakan untuk menganalisis praktek-praktek sosio-kultural yang mencakup level situasional, konstitusional, dan sosial.

Dari adanya kegiatan konstruksi melalui wacana sosial dalam bentuk infografis, output yang ditimbulkan adalah sebuah representasi dari penikmat wacana sosial. Representasi merupakan gambaran pemikiran tentang informasi yang diperoleh. Representasi juga merupakan sebuah kegiatan mengkonstruksi pemikiran. Representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna, konsepnya berubah-ubah dan selalu memunculkan makna yang baru. Pandangan-pandangan baru yang menghasilkan pemaknaan baru tersebut, juga merupakan hasil dari konstruksi pemikiran manusia. (Rachmawaty 2012:8). Melalui

pernyataan tersebut penulis menggunakan konsep representasi dalam proses pengambilan makna pada komentar yang disampaikan oleh golongan muda pada postingan infografis akun Instagram @pinterpolitik. Representasi dinamika politik terdapat pada opini golongan muda di kolom komentar yang dikaji oleh penulis dan akan ditulis oleh penulis sesuai dengan analisis wacana yang merupakan hasil kajian penulis pada bagian kesimpulan, dengan cara menghubungkan komentar dengan konten infografisnya, sehingga penulis dapat memberikan pemaknaan baru mengenai representasi golongan muda dalam merepresentasikan dinamika politik Indonesia di media sosial Instagram.

2.3 Kerangka Dasar Pemikiran

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Representasi Dinamika Politik Golongan Muda Di Media Sosial (Studi Kasus Pesan Politis Infografis Era Pemerintahan Jokowi-Jk Periode 2017-2018 Di Instagram Menjelang Pilpres 2019)



Dalam penelitian ini penulis akan mencari tahu pesan politik yang ada dalam infografis politik akun Instagram @pinterpolitik. Kemudian penulis akan menganalisis pesan politik infografis tersebut menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough untuk mencari tahu representasi terhadap infografis politik akun Instagram @pinterpolitik oleh golongan muda di Instagram. Sehingga dapat diketahui hasil konstruksi akun Instagram @pinterpolitik terhadap golongan muda mengenai dinamika politik di media sosial Instagram.

Penulis memilih melakukan studi kasus terhadap objek infografis untuk mencari tahu pesan politis yang terdapat dalam infografis akun Instagram @pinterpolitik. Kasus yang dipilih merupakan kasus yang terdapat pada rentang waktu tahun 2017-2018 dan terpilih masing-masing satu kasus per tahunnya. Total ada dua kasus dikemas dalam bentuk infografis yang dipilih penulis untuk dicari tahu pesan politisnya kemudian mencari representasinya dengan pendekatan analisis wacana

kritis Norman Fairclough. Analisis wacana kritis model Norman Fairclough menawarkan model tiga dimensi yang harus dianalisis, yakni teks (ucapan, tulisan, *image visual*, atau atau kombinasi dari ketiganya), praktik diskursif yang melingkupi produksi dan konsumsi teks, dan praktik sosial.

Berikut dimensi analisis model Norman Fairclough (Elya, 2014:9):

1. Teks (*text*)

Dimensi pertama adalah teks yang merupakan hasil dari proses produksi. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mendeskripsikan elemen teks verbal dan visual, beserta intertekstual untuk menginterpretasikan wacana dalam teks. Teks verbal terdiri dari kosa kata dan tata bahasa yang digunakan dalam infografis. Sedangkan teks visual adalah ilustrasi, tipografi, *layout*, warna, bentuk, dan prinsip-prinsip desain dalam membentuk infografis (Septian, 2017:9). Dalam Eriyanto (Tulus, 2017:69) teks terbagi menjadi beberapa unsur, pertama ideasional yang merujuk pada representasi tertentu yang ingin disampaikan dalam bentuk teks. Kedua, relasi, merujuk pada analisis konstruksi hubungan antara media dengan netizen atau pengikut akun Instagram @pinterpolitik. Penyampaiannya terbuka atau tertutup, disampaikan dengan model formal atau informal, dll. Ketiga, identitas, merujuk pada konstruksi identitas media dengan pengikut akun Instagram @pinterpolitik.

Setiap unsur teks dapat dianalisis dan diuraikan dengan cara sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tiga elemen dasar model Norman Fairclough

Unsur	Yang ditunjukkan
Representasi	Proses terjadinya peristiwa, orang, kelompok, situasi, dan lain-lain ditampilkan atau digambarkan dalam bentuk teks.
Relasi	Hubungan antara wartawan/media, khalayak/netizen, yang digambarkan dalam teks.
Identitas	Identitas media, netizen, partisipan, ditampilkan atau

	digambarkan dalam bentuk teks.
--	--------------------------------

Sumber : Penelitian terdahulu, dan diolah oleh penulis

2. Praktik Diskursif (*discourse practice*)

Dimensi yang kedua adalah praktik diskursif terkait interaksi teks dengan individu atau masyarakat dalam bentuk proses produksi dan interpretasi. Dalam hal ini praktik diskursif menganalisis maksud, identitas, ideologi, dan pengetahuan dalam teks dengan cara observasi akun Instagram @pinterpolitik. Analisis terhadap pengikut akun Instagram @pinterpolitik dilakukan dengan meninjau komentar yang merupakan bentuk interpretasi dari pengikut akun atas infografis politik yang diposting di media sosial Instagram.

3. Praktik Sosial (*sociocultural practice*)

Dimensi ketiga praktik sosial atau konteks mencakup praktik sosio-kultural dimana proses produksi dan interpretasi itu berlangsung mengenai konteks antara praktik institusi/media dengan masyarakat atau budaya politik. Pada tahap ini wacana teks diberikan penjelasan atau eksplanasi. Penjelasan pada tahap ini terkait dengan konteks interaksi sosial dengan penentuan proses produksi informasi, interpretasi, serta efek lainnya. Praktik wacana yang telah diketahui tersebut dihubungkan dengan tatanan sosial masyarakat dalam etika berkomunikasi saat bermedia sosial, dan lain-lain.